

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS PADA PROGRAM BANK SAMPAH DALAM PEMILAHAN SAMPAH ANORGANIK DI DESA SIDAKARYA

Ni Kadek Novi Dwiyanti¹, Ni Wayan Widhiasthini², Ni Luh Yulyana Dewi³, Anak Agung Istri Agung Maheswari⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Pendidikan Nasional Denpasar

Email Korespondensi: dwiyantin141@gmail.com

Email: widhiasthini74@undiknas.ac.id; yulyanadewi@undiknas.ac.id; agungmaheswari@undiknas.ac.id

ABSTRACT

Waste management has become a global challenge also faced by Indonesia, including Denpasar City. Sidakarya Village, as an area with a high volume of waste generation, strives to achieve sustainable environmental management through the *Bank Sampah* (Waste Bank) program focusing on inorganic waste sorting. This study is motivated by the low public awareness of waste segregation and the suboptimal implementation of policies related to the *Sustainable Development Goals* (SDGs), particularly Goal 12 on responsible consumption and production, Goal 14 on marine ecosystem conservation, and Goal 15 on terrestrial ecosystem preservation. The research was conducted in Sidakarya Village, South Denpasar District, using a descriptive qualitative method based on Van Meter and Van Horn's public policy implementation theory. Informants were selected through purposive sampling, consisting of nine participants from the Environmental and Sanitation Office (DLHK), BUMDes, TPS3R, Waste Bank managers, and community members. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation to obtain a comprehensive overview. The findings indicate that the implementation of the Waste Bank program has reflected the SDGS principles through increased public awareness, inter-institutional collaboration, and tangible contributions to reducing inorganic waste. However, its implementation remains limited due to a lack of human resources, inadequate infrastructure, weak supervision, and inconsistent communication. Continuous education, incentives, and stronger cross-sector coordination are needed to achieve effective, participatory, and sustainable waste management.

Keywords: *Sustainable Development Goals (SDGs)*, Waste Bank, Inorganic Waste Sorting.

ABSTRAK

Permasalahan pengelolaan sampah menjadi tantangan global yang juga dihadapi Indonesia, termasuk Kota Denpasar. Desa Sidakarya sebagai wilayah dengan timbulan sampah tinggi berupaya mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan melalui program Bank Sampah yang berfokus pada pemilahan sampah anorganik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dan belum optimalnya implementasi kebijakan terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya poin 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, poin 14 tentang pelestarian ekosistem laut, serta poin 15 tentang pelestarian ekosistem darat. Penelitian dilaksanakan di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan teori implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn. Informan ditentukan melalui *purposive sampling* sebanyak sembilan orang, terdiri dari pihak DLHK, BUMDes, TPS3R, pengelola Bank Sampah, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi lapangan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Bank Sampah telah mencerminkan prinsip SDGs melalui peningkatan kesadaran masyarakat, kolaborasi antar lembaga, serta kontribusi nyata terhadap pengurangan sampah anorganik. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana,

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

275

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX



lemahnya pengawasan, dan komunikasi antar organisasi yang belum konsisten. Diperlukan peningkatan edukasi berkelanjutan, pemberian insentif, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Sustainable Development Goals (SDGs)*, Bank Sampah, Pemilahan Sampah Anorganik.

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan merupakan hal yang cukup kompleks sehingga membutuhkan perhatian global. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan lingkungan adalah meningkatnya jumlah sampah yang semakin bertambah, baik organik maupun anorganik. Jumlah populasi serta perubahan pola masyarakat seperti peningkatan ekonomi, berubahnya jumlah pendapatan, urbanisasi dan industrialisasi menjadi salah satu penyebab meningkatnya timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat (Sendika et al., 2025). Peningkatan jumlah populasi, perubahan pola masyarakat, peningkatan ekonomi di suatu negara mengakibatkan meningkatnya komsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa. Kondisi ini dapat memicu banyak permasalahan dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah masalah sampah. Peningkatan jumlah sampah hasil komsumsi masyarakat yang tidak diimbangi dengan kemampuan untuk mengelola sampah tersebut, maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat (Hutomo, 2024).

Setiap negara penanganan persoalan sampah berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh kebijakan, peraturan pemerintah, infrastruktur, dan teknologi yang tersedia. Permasalahan sampah di Indonesia yang masih berjalan dengan efektif, sehingga pemerintah harus membuat suatu kebijakan untuk mengelola permasalahan sampah yang terjadi di Indonesia (Paramarta, 2024). Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 mengatur pengelolaan sampah, pembagian kewenangan, dan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Indonesia. Menurut sumber databoks berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan 35,79 juta ton timbulan sampah sepanjang 2024 dari 311 data kabupaten/kota, sedangkan Indonesia memiliki total 514 kabupaten/kota. Dengan demikian, volume aktualnya bisa lebih tinggi dari yang tercatat. Berdasarkan komposisinya sampah terbesar berasal dari sisa makanan, yakni 39,36% dari volume total pada 2024, sampah plastik 19,64% dan kayu atau ranting sebesar 12,62%. Sementara sumber sampah terbesar berasal dari rumah tangga, dengan proporsi 50,8% dari total sampah tercatat pada tahun 2024 (Santika, 2025). Menurut akun resmi Instagram Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali (DKLH) menunjukkan pada tahun 2024, timbulan sampah di Provinsi Bali mencapai 3.600 ton per hari, dengan komposisi sampah 68,82% merupakan sampah organik (sampah sisa makanan 27,62% dan sampah daun 41,2%). Komposisi sampah anorganik di dominasi oleh sampah plastik 13,64% dan sampah kertas/karton 6,87%. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada tahun 2024, Kota Denpasar menghasilkan 366,806,75 ton/tahun dan 1.004,95 to/hari, dengan presentase sampah plastik sebanyak 11,90% atau 119,59 ton/hari. Kota Denpasar menjadi penghasil sampah terbesar di Provinsi Bali pada tahun 2024, yaitu mencapai 1.004,95 ton/hari.

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

Gambar 1: Data Timbulan Sampah di Provinsi Bali Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	TIMBULAN SAMPAH 2024		%plastik	sampah plastik (ton/hari)
		(ton/tahun)	ton/hari		
1	2	3	4	5	6
1	Kab. Jembrana	60.106,92	164,68	19,04%	31,35
2	Kab. Tabanan	86.571,07	237,18	10,51%	24,93
3	Kab. Badung	199.810,15	547,43	28,40%	155,47
4	Kab. Gianyar	205.129,64	562,00	35,88%	201,65
5	Kab. Klungkung	40.829,45	111,86	16,00%	17,90
6	Kab. Bangli	41.557,88	113,86	10,32%	11,75
7	Kab. Karangasem	102.643,48	281,22	8,00%	22,50
8	Kab. Buleleng	150.779,68	413,10	14,69%	60,68
9	Kota Denpasar	366.806,75	1.004,95	11,90%	119,59
BALI		1.254.235,02	3.436,26	16,91%	581,07

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

Pengelolaan sampah plastik merupakan isu krusial, khususnya dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang bertujuan untuk memastikan pola komsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta pelestarian terhadap ekosistem darat dan laut. Sampah plastik memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, termasuk menurunkan kualitas tanah, mencemari sumber air, serta merugikan kehidupan laut. Selanjutnya sistem pengelolaan sampah dengan menggunakan Program Bank Sampah turut berkontribusi terhadap efek sosial yang menguntungkan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Chaerul & Zatadini, 2020).

Bali sebagai daerah pariwisata mempunyai kekayaan alam yang melimpah, hal ini menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Perkembangan pariwisata Bali kini telah mengalami kemajuan pesat secara kuantitas maupun kualitas. Keunikan budaya, keindahan alam Bali menjadikan Bali sebagai primadona wisatawan. Bali dianggap autentik mewakili budaya adiluhung masa lampau yang masih berjalan sampai saat ini (Putra et al., 2025). Semakin banyak wisatawan yang berkunjung, maka berpengaruh juga terhadap volume sampah yang ditimbulkan (Loviannauli & Nugroho, 2021). Hal ini menjadi masalah yang terus disoroti oleh pemerintah karena dapat menimbulkan masalah yang serius bagi keberlangsungan pariwisata di Bali. Permasalahan sampah berpotensi merugikan citra pariwisata Bali di mata masyarakat dunia (Rabbani, 2024).

Sebagai salah satu desa yang terletak di kawasan Kota Denpasar, Desa Sidakarya menjadi pusat perhatian karena tingginya jumlah timbunan sampah yang dihasilkan setiap harinya. Peningkatan timbunan sampah ini terus mengalami lonjakan, khususnya menjelang hari raya umat Hindu, di mana jumlah timbunan sampah diperkirakan mencapai 18 ton dalam sehari (Ica, 2025). Untuk menanggapi situasi tersebut pemerintah desa gencar-gencarnya mensosialisasikan prilaku pengelolaan sampah berbasis sumber (Rina, 2021). Pengelolaan sampah di Desa Sidakarya dapat mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila dikombinasikan dengan teknologi dan disesuaikan dengan kondisi setempat, baik itu kondisi lingkungan maupun sosial masyarakat (Rahmawati et al., 2021). Namun, efektivitas implementasi program Bank Sampah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan masih menjadi tantangan. Berdasarkan laporan data yang diperoleh langsung dari TPS3R Desa Sidakarya (2025) menunjukkan presentase selama bulan Maret hingga Juni 2025 sampah yang masuk setelah dipilah mengalami fluktuasi. Pada bulan Maret, tercatat sebanyak 573 kg sampah anorganik yang berhasil dipilah. Jumlah ini mengalami peningkatan pada bulan April dan Mei menjadi 578 kg dan 589 kg, yang menunjukkan adanya tren positif. Akan tetapi, pada bulan juni volume pemilahan sampah yang masuk menurun secara signifikan menjadi 544 kg / sebesar 7,64% dari presentase bulan sebelumnya. Penurunan ini menunjukkan adanya ketidak konsistensi dalam praktik pemilahan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

277

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX

OneSearch

sampah anorganik, yang menjadikan indikator awal terhadap permasalahan implementasi program yang mengindikasikan berbagai persoalan seperti menurunnya partisipasi masyarakat, kurangnya dukungan fasilitas, atau lemahnya pengawasan dan sosialisasi.

Dengan adanya berbagai masalah dan kendala yang terjadi dalam proses implementasi *Sustainable Development Goals* pada program Bank Sampah dalam pemilahan sampah anorganik di Desa Sidakarya, perlu adanya analisis secara mendalam terkait dengan implementasi program Bank Sampah di Desa Sidakarya. Implementasi kebijakan publik oleh Van Meter dan Van Horn (1975) dimaknai sebagai upaya/tindakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan (Assa et al., 2025). Dalam implementasi kebijakan *Sustainable Development Goals* pada program Bank Sampah dalam pemilahan sampah anorganik di Desa Sidakarya tidak lepas dari hambatan dan kendala yang terjadi di lapangan, yang dihadapi oleh pelaksana implementasi kebijakan program Bank Sampah. Untuk mengukur keberhasilan Implementasi *Sustainable Development Goals* pada program Bank Sampah dalam pemilahan sampah anorganik dapat diukur melalui implementasi kebijakan oleh teori Van Meter dan Van Horn (1975) yang memiliki enam indikator pengukur yaitu 1) Standar dan Tujuan Kebijakan, 2) Sumber Daya, 3) Komunikasi Antar Organisasi, 4) Sikap Pelaksana, 5) Struktur Organisasi, 6) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik (Fauziyah & Arif, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengulas terkait bagaimana implementasi *Sustainable Development Goals* pada program Bank Sampah dalam pemilahan sampah anorganik di Desa Sidakarya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi *Sustainable Development Goals* pada program Bank Sampah dalam pemilahan sampah anorganik di Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Teknik penentuan informan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Data yang diperoleh dari informan yang terlibat dalam program Bank Sampah ini, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, Pengurus Bank Sampah di Desa Sidakarya, Ketua TPS3R, Ketua Bank Sampah, Masyarakat yang terlibat dalam program Bank Sampah. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, serta dokumen agar data yang diperoleh valid, reliabel, dan konsisten dengan kondisi nyata di lapangan.

PEMBAHASAN

Implementasi *Sustainable Development Goals* Pada Program Bank Sampah Dalam Pemilahan Sampah Anorganik di Desa Sidakarya

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Provinsi Bali dengan melibatkan beberapa informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, Ketua BUMDes sebagai pengurus Bank sampah di Desa Sidakarya, Ketua TPS3R Desa Sidakarya, Ketua Bank Sampah, Masyarakat Desa yang terlibat pada program Bank Sampah

“*DLHK Kota Denpasar memiliki peran utama dalam pengurangan dan penanganan sampah yang masuk ke TPA melalui pembentukan serta pengembangan program Bank Sampah sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. DLHK berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan agar program berjalan efektif dan berkelanjutan, sedangkan penyediaan fasilitas penunjang menjadi tanggung jawab masing-masing desa. Saat ini terdapat 341 Bank Sampah di empat kecamatan di Kota Denpasar, termasuk di Desa Sidakarya, yang berperan aktif dalam mengurangi volume sampah anorganik dan menekan beban TPA*”.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

278

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

Hasil wawancara menunjukkan bahwa DLHK Kota Denpasar memiliki peran sentral dalam pengelolaan dan pemilahan sampah melalui program Bank Sampah, dengan fokus pada pengurangan sampah yang masuk ke TPA. DLHK bertanggung jawab atas pembentukan, pembinaan, dan pengawasan program sesuai Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015, sementara penyediaan fasilitas penunjang menjadi kewenangan masing-masing desa. Keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah kota, desa, dan masyarakat. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Denpasar, telah terbentuk 341 Bank Sampah yang terdiri atas Bank Sampah Induk, Mandiri, dan Sekolah di empat kecamatan. Di Desa Sidakarya, program ini menunjukkan perkembangan positif dengan dukungan DLHK melalui keberadaan TPS3R dan Bank Sampah di 12 dusun.

Selain peran DLHK Kota Denpasar, Desa Sidakarya juga mendapat dukungan dari aparat desa dengan menunjuk Ketua BUMDes, I Wayan Tirtayasa, sebagai penanggung jawab program Bank Sampah. Dalam wawancara, beliau menjelaskan standar dan tujuan kebijakan desa dalam mendukung implementasi SDGs melalui program tersebut

“Pemerintah Desa Sidakarya secara konsisten melaksanakan program persampahan sejak 2021 dengan menunjuk BUMDes sebagai pelaksana Bank Sampah. Program ini berasal dari permasalahan penumpukan sampah di TPS dan pengelolaan manual yang menyulitkan, sehingga pemerintah desa bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk meningkatkan pengelolaan. Kini, seluruh 12 dusun di Desa Sidakarya memiliki Bank Sampah aktif. Tujuannya adalah mewujudkan desa bebas sampah plastik sesuai SDGs poin 12, mendorong tanggung jawab masyarakat dalam pemilahan sampah, serta memberikan manfaat ekonomi melalui hasil penjualan sampah dengan motto ‘Merubah Sampah Menjadi Rupiah.’”

Gambar 2: SK Penetapan Bank Sampah



Sumber: Dokumen DLHK Kota Denpasar

Pernyataan tersebut diperkuat dengan data lapangan berdasarkan SK Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/294/HK/2025 Tentang Bank Sampah dalam Rangka Pengelolaan Sampah, yang menyebutkan bahwa seluruh 12 dusun di Desa Sidakarya, antara lain Dusun Kerta Sari, Dukuh Mertajati, Tengah, Graha Kerti, Sari, Graha Santhi, Sekar Kangin, Kerta Dalem, Suwung Kangin, Kerta Raharja, Wira Satya, dan Kerta Petasikan telah terlibat aktif dalam program Bank Sampah.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

279

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Made Andy, selaku Ketua TPS3R Desa Sidakarya mengenai bagaimana mekanisme kerja operasional TPS3R dalam mendukung implementasi program Bank sampah di Desa Sidakarya. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Yang pertama yang kita lakukan adanya edukasi ke kader-kader dusun, edukasi tersebut diberikan oleh desa dengan waktu 1 tahun sekali. Kemudian setelah edukasi, dilanjutkan ketahapan eksekusi dimana dilakukan oleh TPS3R yang memiliki peran dalam pengangkutan sampah yang sudah terkumpul dimasing-masing Bank Sampah dusun”.

Hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Tirta dan Bapak Made Andy menunjukkan bahwa program Bank Sampah di Desa Sidakarya merupakan wujud komitmen pemerintah desa mendukung SDGs poin 12, 14, dan 15. BUMDes ditetapkan sebagai pelaksana utama bekerja sama dengan pihak swasta untuk menciptakan pengelolaan sampah berkelanjutan. Program ini mengurangi sampah plastik sekaligus memberi manfaat ekonomi melalui tabungan hasil penjualan sampah dengan motto “Merubah Sampah Menjadi Rupiah.” TPS3R berperan dalam edukasi kader dan pengangkutan sampah. Namun, tantangan masih terdapat pada rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah.

Pernyataan tersebut, di tambahkan oleh Ketua Bank Sampah Dusun adat Dukuh, Ibu Ni Made Mekar. Membahas mengenai mekanisme serta sistem operasional Bank Sampah di Dusun Dukuh, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Sistemnya dilakukan setiap bulan sekali, dimana masyarakat mengumpulkan sampahnya di rumah masing-masing dan membawakan ke Bank Sampah untuk dilakukan penimbangan serta penjualan, hasil penjualan dijadikan sebuah tabungan yang dimana bisa ditarik oleh nasabah. Kami memiliki 50 orang nasabah yang ikut dalam program Bank Sampah”.

Hal serupa juga, di ungkapkan oleh Ibu Agung Ari Mastuti, ketua Bank Sampah Dusun Dinas Wirasatya. Beliau mengatakan sebagai berikut:

“Dimana Bank Sampah kami buka 2 kali dalam 1 bulan, di minggu pertama dan minggu ke tiga. Dimana nasabah kami terdapat 180 orang”.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa mekanisme operasional Bank Sampah di Desa Sidakarya berjalan teratur dan disesuaikan dengan kondisi tiap dusun. Pengumpulan dan penimbangan sampah dilakukan rutin di rumah warga lalu disetorkan ke Bank Sampah sesuai jadwal. Di Dusun Adat Dukuh kegiatan dilakukan sebulan sekali, sedangkan di Dusun Dinas Wirasatya dua kali sebulan. Perbedaan frekuensi ini menyesuaikan tingkat partisipasi masyarakat dan kapasitas pengelolaan. Secara umum, pengurus telah mengatur alur kegiatan dengan baik mulai dari pengumpulan, penimbangan, pencatatan, hingga pengangkutan ke TPS3R.

Keberhasilan program Bank Sampah sebagai bagian dari penerapan SDGs bergantung pada koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait. Untuk itu, peneliti mewawancarai DLHK Kota Denpasar melalui Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bapak I Ketut Adi Wiguna, SH., M.Si. Beliau menyampaikan:

“Koordinasi DLHK dilakukan melalui pembentukan program Bank Sampah di setiap kecamatan yang melibatkan banjar atau dusun. Setiap desa melaporkan pelaksanaannya ke DLHK, yang kemudian membina serta menjelaskan prosedur pengelolaan program tersebut”.

Pernyataan tersebut di tambahkan oleh Bapak I Wayan Tirtayasa selaku kepala BUMdes Desa Sidakarya sekaligus Ketua Pengelolaan Program Bank Sampah di Desa Sidakarya, beliau mengatakan:

“Pemerintah Desa Sidakarya berkoordinasi dengan memberi mandat kepada BUMDes sebagai pengelola utama program Bank Sampah dan melibatkan seluruh masyarakat melalui Bank Sampah di tiap dusun. Koordinasi di tingkat dusun melibatkan nasabah serta kader Bank Sampah dalam pelaksanaannya”.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

280

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX



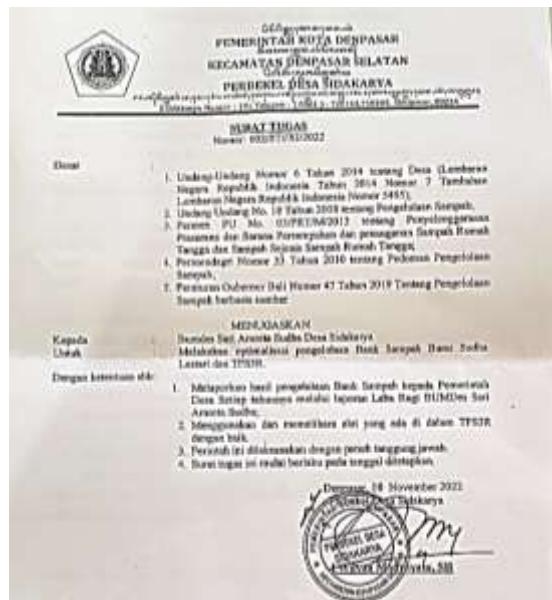
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan Program Bank Sampah di Desa Sidakarya merupakan wujud nyata implementasi SDGs poin 12, 14, dan 15, yang menekankan konsumsi dan produksi bertanggung jawab serta pelestarian ekosistem laut dan darat. Melalui kegiatan pemilahan dan pemanfaatan sampah anorganik, program ini menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. DLHK Kota Denpasar berperan dalam pembinaan, sementara BUMDes menjadi pengelola utama dengan melibatkan kader dan nasabah di tiap dusun. Temuan ini diperkuat oleh dokumen Surat Tugas BUMDes dan dokumen pembinaan DLHK, yang menunjukkan langkah sistematis dalam pengelolaan. Namun, masih dibutuhkan penguatan komunikasi, pengawasan, dan evaluasi agar program lebih optimal.

Gambar 3: Dokumen Surat Penugasan BUMDes



Sumber: Arsip Kator Desa Sidakarya

Dengan demikian hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SDGs melalui program Bank Sampah dipengaruhi oleh peran strategis DLHK Kota Denpasar sebagai pembina dan pengarah kebijakan. Aspek komunikasi program ini dijelaskan lebih lanjut melalui wawancara dengan Ketua TPS3R Desa Sidakarya, Bapak I Made Andy, selaku pelaksana koordinasi dan pengelolaan sampah di tingkat desa. Beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Dalam menjalin komunikasi, TPS3R berkolaborasi dengan PT Sangkara yang memiliki spesialisasi daur ulang dan bekerja sama dengan Bank Sampah di setiap banjar. BUMDes bertindak sebagai penanggung jawab utama, sementara TPS3R bersama desa memberikan pelatihan kepada pengurus Bank Sampah serta menjelaskan harga jual sampah yang diterapkan di tiap dusun”.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pola komunikasi TPS3R Desa Sidakarya dalam pelaksanaan program Bank Sampah bersifat kolaboratif dan terstruktur, melibatkan TPS3R, BUMDes, PT Sangkara, serta pengurus Bank Sampah di tiap dusun. Melalui pelatihan dan sosialisasi yang difasilitasi TPS3R dengan dukungan desa dan BUMDes, pengurus memperoleh pemahaman tentang pengelolaan serta standar harga jual sampah. Namun, komunikasi dengan masyarakat umum masih bersifat tidak langsung, karena sosialisasi hanya melibatkan perangkat desa dan pengurus Bank Sampah, bukan masyarakat secara

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

281

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

luas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan intensitas dan perluasan sosialisasi langsung agar kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat lebih optimal.

Terkait komunikasi penyampaian informasi mengenai tujuan, manfaat, mekanisme, dan jadwal program Bank Sampah, disampaikan oleh anggota Bank Sampah Dusun Adat Dukuh, Ibu Ni Made Sriwati, beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Informasi jadwal pelaksanaan program Bank Sampah disampaikan melalui grup PKK banjar, tanpa sosialisasi khusus dari pengurus atau desa, namun Kepala Desa Sidakarya selalu mengingatkan masyarakat untuk memilah sampah dalam setiap kegiatan desa”.

Gambar 4: Pengumuman Jadwal Bank Sampah Melalui WA Grup



Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa komunikasi terkait tujuan, manfaat, mekanisme, dan jadwal program Bank Sampah di Desa Sidakarya masih informal dan terbatas, umumnya melalui grup WhatsApp PKK dan kegiatan arisan tanpa sosialisasi khusus. Meskipun Kepala Desa kerap mengingatkan pentingnya pemilahan sampah, penyampaian informasi belum merata karena hanya menjangkau anggota aktif Bank Sampah, sementara sistem komunikasi formal belum terbentuk.

Untuk mendukung pelaksanaan program Bank Sampah di Desa Sidakarya, diperlukan strategi penyediaan sumber daya seperti dana, sarana prasarana, dan SDM. Terkait hal ini, peneliti mewawancara Bapak I Wayan Tirtayasa selaku Kepala BUMDes sekaligus Ketua Pengelola Program Bank Sampah Desa Sidakarya.

“Sumber daya Bank Sampah meliputi dana awal dari BUMDes, bangunan TPS 3R dari pemerintah desa, serta fasilitas pengelolaan sampah seperti mesin fres, mesin caca, dan alat penunjang lainnya”.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
tedaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

282

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX

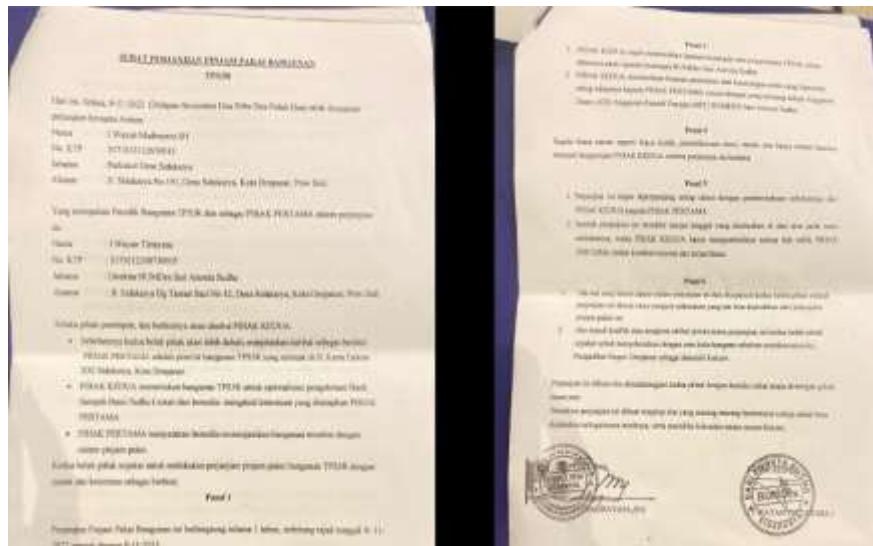


GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

Gambar 4: Dokumen Perjanjian Sewa Bangunan TPS3R



Sumber: Arsip Kantor Desa Sidakarya

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lokasi TPS3R Desa Sidakarya, ditemukan bahwa infrastruktur seperti bangunan dan mesin-mesin pendukung memang sesuai dengan deskripsi yang disampaikan dalam wawancara. Bangunan TPS3R seluas sekitar 3 are terlihat kokoh dan memenuhi standar operasional, dan mesin-mesin seperti mesin pres dan mesin cacaht ditempatkan di area yang strategis dan mudah diakses oleh petugas. Selain itu petugas yang bekerja di lokasi mayoritas adalah warga setempat, yang juga sesuai dengan pernyataan bahwa tenaga kerja dari desa digunakan sepenuhnya dari sumber daya lokal. Fasilitas tersebut berdiri di area TPS3R dan secara administratif didukung oleh dokumen resmi berupa surat perjanjian pinjam pakai bangunan yang dibuat oleh pihak desa sebagai dasar hukum dalam penggunaan fasilitas tersebut. Selain itu, tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan Bank Sampah dan TPS3R seluruhnya merupakan masyarakat Desa Sidakarya, yang dibuktikan melalui data pegawai yang diperoleh di lapangan.

Pengelolaan sampah di Desa Sidakarya berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, namun efektivitas implementasi program Bank Sampah masih menghadapi tantangan seperti fluktuasi partisipasi masyarakat, keterbatasan fasilitas, serta lemahnya pengawasan dan sosialisasi (Rahmawati et al., 2021). Penurunan volume pemilahan pada Juni 2025 menjadi indikasi adanya ketidakkonsistenan pelaksanaan di lapangan. Berdasarkan teori implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn dalam (Nurliatin et al., 2025), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh enam indikator: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, sikap pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Penerapan teori ini pada program Bank Sampah di Desa Sidakarya digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan berjalan efektif serta mengidentifikasi faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan aspek kelembagaan, komunikasi, dan komitmen pelaksana agar program dapat terlaksana secara efektif, konsisten, dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan berperan penting dalam menentukan arah, sasaran, dan ukuran keberhasilan suatu program. Menurut (Putra et al., 2025) standar dan tujuan kebijakan harus dirumuskan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

283

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX



dengan jelas, terukur, realistik, dan mudah dipahami oleh seluruh pelaksana agar pelaksanaan berjalan efektif. Ketidakjelasan tujuan dapat menimbulkan perbedaan pandangan di lapangan yang menghambat hasil kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara di Desa Sidakarya, Pemerintah Desa melalui BUMDes telah menetapkan program Bank Sampah dengan tujuan mewujudkan sistem pengelolaan dan pemilahan sampah berkelanjutan, mengurangi volume sampah plastik, serta mendukung *Sustainable Development Goals* poin 12, 14, dan 15. Program ini tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi melalui konsep “Mengubah Sampah Menjadi Rupiah.” Penelitian (Megariska & Sukmana, 2022) menegaskan bahwa kejelasan standar dan tujuan kebijakan menjadi faktor utama keberhasilan implementasi program. Di Desa Sidakarya, kejelasan arah kebijakan telah membantu pelaksana dalam menjalankan kegiatan pemilahan sampah, meskipun masih terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat yang menyebabkan pelaksanaan belum optimal.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan elemen krusial dalam implementasi *Sustainable Development Goals* pada program Bank Sampah di Desa Sidakarya. Ketersediaan dana, sarana prasarana, dan tenaga kerja menjadi faktor utama keberhasilan pelaksanaan program (Siswanto et al., 2025) Pemerintah Desa dan BUMDes menyediakan fasilitas seperti bangunan TPS3R, mesin press, mesin pencacah, serta timbangan digital, sementara pendanaan operasional diperoleh dari hasil kerja sama daur ulang dengan pihak luar. Seluruh tenaga kerja berasal dari warga lokal, yang sekaligus membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, keterbatasan jumlah tenaga kerja menyebabkan kegiatan sosialisasi dan pengawasan belum optimal. Penelitian (Ruswendi et al., 2024) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan kelembagaan secara sinergis serta penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Dengan demikian, efektivitas sumber daya menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan program Bank Sampah di Desa Sidakarya.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antarorganisasi merupakan elemen kunci keberhasilan implementasi program Bank Sampah di Desa Sidakarya dan mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (Putra et al., 2025). Efektivitas kebijakan bergantung pada kejelasan dan konsistensi komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan. Pelaksanaan program melibatkan Pemerintah Desa, BUMDes, TPS3R, dan DLHK Kota Denpasar melalui koordinasi, sosialisasi, dan pembinaan rutin. Namun, komunikasi yang terjalin masih bersifat informal dan belum terdokumentasi secara sistematis, sehingga informasi tidak tersampaikan merata kepada masyarakat. Akibatnya, sebagian warga belum memahami mekanisme pemilahan sampah dengan benar. Sejalan dengan (Nurliatin et al., 2025), koordinasi dan komunikasi antar lembaga sangat menentukan efektivitas kebijakan, sedangkan lemahnya komunikasi dapat menimbulkan keterlambatan pelaksanaan dan rendahnya pengawasan terhadap hasil program.

4. Sikap Para Pelaksana

Sikap pelaksana kebijakan berperan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi program. Pelaksana yang memiliki komitmen, proaktif, dan terbuka terhadap perubahan akan lebih efektif menjalankan kebijakan, sedangkan sikap apatis dapat menjadi hambatan (Putra et al., 2025). Di Desa Sidakarya, pelaksana Bank Sampah umumnya menunjukkan sikap positif dan kesadaran tinggi terhadap pentingnya pengelolaan sampah berbasis lingkungan untuk mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs), meskipun sebagian kader di tingkat dusun masih kurang aktif dalam sosialisasi. Kurangnya insentif dan tingginya beban kerja turut menurunkan motivasi pelaksana. Sejalan dengan (Nurliatin et al., 2025) pelaksana yang memiliki persepsi positif akan lebih berkomitmen terhadap tujuan program. Karena itu, diperlukan pembinaan dan penghargaan berkala agar sikap positif pelaksana tetap terjaga dan mendukung efektivitas program Bank Sampah di Desa Sidakarya.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

284

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX



5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi berperan penting dalam pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab agar program berjalan efektif. Struktur yang terlalu kompleks dapat menghambat pelaksanaan kebijakan, sehingga diperlukan sistem yang sederhana dan fleksibel (Putra et al., 2025). Di Desa Sidakarya, struktur program Bank Sampah terdiri dari Pemerintah Desa, BUMDes, TPS3R, dan pengurus di tiap dusun. BUMDes berfungsi sebagai penanggung jawab utama, sementara TPS3R mengelola operasional pemilahan dan pengolahan sampah, dan pengurus dusun bertugas mengatur kegiatan lokal serta administrasi. Struktur yang sederhana ini mempermudah koordinasi antar pihak, meskipun komunikasi di tingkat dusun masih perlu diperkuat. Sejalan dengan (Viranda et al., 2024), struktur organisasi yang jelas dan tidak rumit mendukung efektivitas implementasi serta keberhasilan program pengelolaan sampah berkelanjutan di Desa Sidakarya.

6. Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik

Program Bank Sampah di Desa Sidakarya. Secara sosial, kesadaran dan partisipasi masyarakat menentukan efektivitas pemilahan sampah; secara ekonomi, nilai jual sampah anorganik mendorong motivasi masyarakat; dan secara politik, dukungan serta kebijakan pemerintah desa menjaga keberlanjutan program. Penelitian (Ivakdalam & Far Far, 2022) menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat, dukungan lingkungan, dan kebijakan konsisten menjadi faktor utama keberhasilan pengelolaan sampah. Hasil observasi menunjukkan sinergi ketiga aspek ini menciptakan lingkungan kondusif untuk pencapaian SDGs, meski masih terkendala rendahnya kesadaran masyarakat, fluktuasi harga sampah, serta kurangnya pembinaan dan sarana prasarana. Sejalan dengan (Putra et al., 2025) dan teori Van Meter & Van Horn, faktor sosial, ekonomi, dan politik merupakan variabel eksternal yang sangat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, menunjukkan bahwa implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) pada program Bank Sampah di Desa Sidakarya dilaksanakan melalui sinergi antara Pemerintah Desa, BUMDes, TPS3R, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar. Program ini berperan penting dalam pengurangan sampah anorganik melalui kegiatan pemilahan dari sumber serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui sistem tabungan hasil penjualan sampah dengan konsep "Mengubah Sampah Menjadi Rupiah." Implementasi program juga mencerminkan dukungan nyata terhadap pencapaian SDGs poin 12 (dua belas) tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, poin 14 (empat belas) tentang pelestarian ekosistem laut, dan poin 15 (lima belas) tentang pelestarian ekosistem darat. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan program Bank Sampah di Desa Sidakarya dipengaruhi oleh implementasi kebijakan publik yang di dalamnya mencakup indikator standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, sikap pelaksana, struktur organisasi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang saling berinteraksi dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan berbasis masyarakat.

REFERENSI

- Amru Rabbani, M. (n.d.). Peran Aktor Non-Negara dalam Mengatasi Isu Sampah Plastik di Pantai Kuta, Bali.
- Assa, J. V., Mokat, J. J., & Mamonto, F. (2025). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Sekolah Dasar, 6, 1122–1127.
- Chaerul, M., & Zatadini, S. U. (2020). Perilaku Membuang Sampah Makanan dan Pengelolaan Sampah Makanan di Berbagai Negara: Review. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(3), 455–466. <https://doi.org/10.14710/jil.18.3.455-466>
- Fauziyah, W. E., & Arif, L. (2021). Model implementasi kebijakan van meter dan van horn dalam tinjauan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

285

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 2 Desember 2025

- pembangunan jalan lingkar selatan (ring road) di kabupaten tuban. *Journal Publicuho*, 4(2). <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18573>
- Ica. (2025). TPS3R Sidakarya Terima 18 Ton Sampah Saat Hari Raya. *Nusa Bali.Com*.
- Ivakdalam, L. M., & Far Far, R. A. (2022). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Keberlanjutan Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah (Increasing Community *Participation in Sustainable Waste Management through Waste Banks*). 15(1), 165–181. <https://doi.org/10.52046/agrikan.v15i1.165-181>
- Lalita Paramarta, G. (2024). Perbandingan Pengelolaan Sampah di Negara Indonesia dan Negara Singapura *Comparison of Waste Management in Indonesia and Singapore*. *Jurnal Hukum Positum*, 9(2).
- Loviannauli, T., & Nugroho, S. (n.d.). Jurnal Destinasi Pariwisata Penelitian Komparatif Mengenai Pengelolaan Sampah Di Daya Tarik Wisata Pantai Candikusuma Jembarana Dan Pantai Kuta Badung.
- Megariska, R., & Sukmana, H. (2022). Implementasi Program Pengelolaan Bank Sampah Anggrek Di Desa Larangan Kecamatan Candi. 7(2), 251–266.
- Nurliatin, L., Sarihati, T., & Rohayati, Y. (2025). Implementasi kebijakan rumah tidak layak huni di kecamatan conggeang kabupaten sumedang (Vol. 1, Issue 1). *Bulan*.
- Putra, I. D., Rahmadanik, D., & Soesiantoro, A. (2025). Implementasi program dandan omah untuk mewujudkan rumah layak huni di kota surabaya. 5(03).
- Putra, I. W. S., Dewi, N. D. U., & Widanti, N. P. T. (2025). Pengelolaan Sampah Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Kabupaten Gianyar.
- Rahmawati, A. F., Amin, Rasminto, & Syamsu, F. D. (2021). Analisis pengelolaan sampah berkelanjutan pada wilayah perkotaan di indonesia. In *Maret* (Vol. 8, Issue 1).
- Rina. (2021). Desa Sidakarya Siapkan TPS3R, Warga Tak Pilah Sampah Terancam Sanksi. *Nusa Bali.Com*.
- Ruswendi, A., Farida Sahrul, S., Elizabeth Patras, Y., Artikel Abstrak Kata Kunci, I., & Dasar, S. (2024). *Implementasi Education for Sustainable Development (ESD) melalui Pengelolaan Sampah di Sekolah Dasar*.
- Santika Erlina F. (2025). volume-timbulan-sampah-yang-tercatat-di-indonesia-(2019-2024)_.
- Sendika, A., Marbun, N., Trya, N., Ambarita, F., Gultom, N. G., Lumbantobing, O. L., Tupa, F., Silalahi, R., Studi, P., Rekayasa, M., & Industri, T. (2025). Pengolahan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Pintu Bosi Menggunakan Metode Sistem Dinamik Dengan Model Stock And Flow Diagram. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(7), 21–37.
- Siswanto, R. D., Radjikan, & Basyar, M. R. (2025). Sstudi Komparatif Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah di Kota Surabaya. *Maret*, 5(02).
- Sri Hutomo. (2024). Penegakkan Hukum Untuk Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi. *Jurnal Hukum Tora : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 10(1), 105–118. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i1.330>
- Viranda, E., Novaria, R., & Soesiantoro, A. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Penerapan Sustainable Development Goals (SDGS) di Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

286

Indexed



SINTA 5

PKP INDEX

